

MENGEMBANGKAN ETOS KEILMUAN UNTUK INDONESIA MASA DEPAN

Oleh Nurcholish Madjid

Keyakinan diri dan kemampuan kita dalam menghadapi masa depan sangat tergantung pada bagaimana cara berpikir kita. Jika agama Islam mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah “apa yang ada dalam diri mereka” (*mā bi-anfusihi*), maka tafsir yang paling sesuai ialah bahwa perubahan nasib sangat tergantung kepada perubahan cara berpikir tadi. Sebab cara berpikir merupakan salah satu yang paling substantif dalam diri kita (ingat, misalnya, Des Cartes: *cogito ergo sum*).

Perhatian yang semakin besar sekarang ini—akibat kesadaran yang semakin tinggi dan mendalam—diberikan kepada masalah pembinaan sumber daya manusia. Semula orang mengira bahwa memiliki kekayaan alam (*natural resources*) adalah jaminan bagi kemakmuran. Tetapi kenyataannya sekarang sebagaimana dibuktikan oleh negeri-negeri “Ular Naga Kecil” (*Little Dragons*), yaitu Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, dan Singapura—dan tentu saja sebelumnya ialah Jepang—yang semuanya praktis miskin sumber daya alam namun kaya dengan SDM yang berkualitas tinggi, dalam arti taraf pendidikannya yang tinggi. Dari sini dapat disimpulkan dengan pasti bahwa faktor manusia adalah jauh lebih menentukan daripada faktor sumber alam. Oleh karena itu, segi pendidikan keterampilan dipandang dan telah dibuktikan sangat menentukan.

Namun, masalah SDM ini sesungguhnya tidak hanya diukur dengan masalah pendidikan keterampilan semata. Kecuali jika

“pendidikan” di sini kita maksudkan segenap usaha penumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya manusia yang ada pada generasi muda dan tidak terbatas hanya kepada kegiatan belajar-mengajar di lembaga-lembaga pendidikan formal. Sebenarnya masalah SDM juga sangat ditentukan oleh etos-etos, salah satunya ialah etos keilmuan—di samping etos kerja dan etos-etos yang lain, serta sistem moral-etis yang mendasari tingkah laku para anggota masyarakat. Berikut ini kami sampaikan pokok-pokok persoalan yang kiranya dapat dijadikan pangkal pembahasan bersama.

Setelah hidup dalam alam kemerdekaan selama lebih setengah abad ini, rakyat Indonesia memiliki sejumlah anggota kelas terpelajar—dalam arti mereka yang lulusan perguruan tinggi—yang cukup besar. Mereka merupakan “kelas menengah” yang sangat berarti dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kelas menengah” di sini ialah kelompok sosial yang sangat berpengaruh dalam penentuan kecenderungan masyarakat, dan berperan dalam proses-proses penumbuhan keterbukaan dan demokrasi.

Sejak tahun 80-an, dampak sosial dari kehadiran kaum terpelajar dari kalangan rakyat, yang sebagian besar beragama Islam, mulai terasa. Ini dapat disaksikan dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya sektor kehidupan yang menyangkut kelompok *knowledge workers*, yang menjadi karakteristik utama kehidupan modern yang maju. Masa depan bangsa dan negara kita akan sangat ditentukan oleh kehadiran kaum terpelajar ini yang merupakan hasil terpenting dari kemerdekaan. Dengan syarat kita harus mampu mengarahkan dengan tepat sehingga tidak malah kontra-produktif, seperti terciptanya “pengangguran intelektual”. Seperti telah disinggung di atas, lahirnya SDM yang berkualitas itu sangat tergantung pada seberapa jauh kita berhasil mengembangkan etos keilmuan di kalangan masyarakat luas. Ini lebih-lebih dirasakan jika diingat bahwa Indonesia adalah salah satu negeri yang paling terbelakang di bidang keilmuan di kalangan bangsa-bangsa Asia Tenggara (mungkin juga di kalangan bangsa-bangsa Asia Timur pada umumnya, dengan mengecualikan

beberapa negara yang masih dilanda krisis gawat seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos).

Relevansi membicarakan usaha penumbuhan dan pengembangan etos keilmuan di kalangan Islam dapat kita lihat melalui dua indikator. *Pertama*, faktor sosiologis-demografis; semata-mata berdasarkan kenyataan bahwa rakyat Indonesia sebagian besar beragama Islam. *Kedua*, faktor historis-ideologis; untuk jangka waktu yang lama (lebih dari lima abad) Islam telah menunjukkan kejeniusannya sebagai pendukung dan pendorong pesatnya perkembangan etos keilmuan yang mendasari etos keilmuan modern sekarang. Hal ini tidak hanya dikemukakan oleh para sarjana Muslim sendiri, tetapi juga oleh para sarjana Barat (lihat lampiran I).

Dalam lampiran I itu terbaca:

During the height of Arabic civilization around the year 1000, while Western Europe was still crawling out of the Dark Ages, they formulated for the first time the modern scientific method.

(Pada masa kejayaan peradaban Arab [yakni, Islam—NM] sekitar tahun 1.000, ketika Eropa Barat masih merangkak keluar dari Zaman Kegelapan, mereka [kaum Muslim—NM] untuk pertama kalinya merumuskan metode ilmiah modern).

Juga terbaca:

Here are the basic ideas of the scientific method. Science begins from systematic observation and measurement, but it does not stop there, like a mere collector of information about nature. The creative act is to generalize from data, to hypothesize a possible physical process and to describe the process in mathematical terms.

(Inilah ide-ide dasar metode ilmiah. Ilmu dimulai dari observasi dan pengukuran sistematis, namun tidak berhenti hanya sampai di situ, seperti halnya seorang kolektor informasi tentang alam.

Tindakan kreatifnya ialah bagaimana melakukan generalisasi dari data yang ada, untuk membuat hipotesa tentang suatu proses fisis yang mungkin terjadi dan untuk membuat gambaran proses itu dalam rumus-rumus matematis).

Diterapkan pada kajian keilmuan yang menyeluruh—tidak hanya bidang kajian fisika semata—metode ilmiah modern yang dirintis oleh peradaban Islam itu dimulai dengan mengumpulkan, memperhatikan, dan mempelajari data-data yang relevan seluas dan selengkap mungkin, kemudian menyusunnya secara sistematis dengan mencari hubungan logis dan organis unsur-unsur data itu, lalu dibuat kesimpulan umum atau generalisasi. Karena pentingnya observasi itu maka para sarjana Islam klasik memelopori metode empirik, sesuai dengan jalan pikiran mereka, seperti dapat disimpulkan dari ungkapan Ibn Taimiyah, “Hakikat ada dalam kenyataan, tidak dalam pikiran” (*al-haqīqat-u fī ‘l-a’yān, lā fī ‘l-adzhān*).

Generalisasi pada tingkat yang cukup tinggi di bidang nilai-nilai kemasyarakatan, akan membuat suatu nuktah ajaran menjadi bersifat mencakup semua pihak atau inklusivistik, dan tidak terbatas hanya kepada pihak tertentu semata atau eksklusivistik, sehingga dapat ditingkatkan menjadi suatu nilai nasional atau universal, dan tidak semata milik nilai kelompok tertentu saja. Dengan begitu suatu nuktah ajaran akan lebih terjamin untuk terlaksana, karena menjadi tanggung jawab bersama dan didukung oleh kalangan luas. Contoh nilai universal yang ada di negeri kita ini adalah ajaran musyawarah, suatu ajaran al-Qur’an yang sudah sangat terkenal. Pentingnya nilai musyawarah ini juga tercermin dalam ucapan bijak dalam Islam, “Pangkal kebijaksanaan ada dalam musyawarah” (*Ra’s-u ‘l-hikmat-i al-masyūrah*). Kini musyawarah sudah menjadi nilai nasional, dalam arti menjadi milik bangsa dan disertai oleh seluruh bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

Dalam etos keilmuan Islam, generalisasi itu antara lain mendorong para sarjana untuk mencoba memahami ide dasar penetapan hukum (*hikmat al-tasyrī*) dan mencari alasan hukum (*‘illat al-hukm*,

ratio legis) yang terwujud dalam kaedah-kaedah pokok yurisprudensi. Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan etos intelektual kaum Muslim, adalah penting sekali memahami ini semua. Maka, untuk bahan perenungan yang lebih luas dan mendalam, di bawah ini dilampirkan kaedah-kaedah pokok yurisprudensi atau ushul fiqh sebagaimana dirintis oleh Imam Syafi'i. Relevan dengan etos ini ialah ide di kalangan para tokoh Syuriah NU bahwa mengikuti suatu mazhab, seperti mazhab Syafi'i, tidak hanya terbatas pada pendapat-pendapat *ad hoc*-nya ("*qawl-an*") melainkan lebih terfokus pada metodologinya ("*manhaj-an*"). Metode berpikir seperti ini akan menghasilkan dinamika intelektual yang kreatif, bebas, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Jadi, etos ilmiah Islam yang menjadi pangkal etos ilmiah modern sekarang ini berawal dari sikap-sikap memperhatikan dan mempelajari alam sekeliling kita, baik alam besar, yaitu jagad raya maupun alam kecil, yaitu manusia sendiri dan kehidupannya, kehidupan individual dan sosialnya. Namun, berbeda dengan etos ilmiah Barat sekarang ini, etos ilmiah Islam bertolak dari rasa keimanan dan takwa, kemudian membimbing dan mendorong orang ke arah tingkat keimanan dan takwa yang lebih tinggi dan mendalam. Inilah yang dikehendaki oleh al-Qur'an dalam dorongannya kepada umat manusia untuk memperhatikan keadaan sekelilingnya. Maka para sarjana, kaum intelektual atau ulama—kata '*ulamā*' dalam bahasa Arab makna generiknya sebagai ilmunan, *scientist*—adalah golongan masyarakat yang diharapkan paling mampu meresapi ketakwaan, karena itu juga paling tinggi dalam menampilkan tingkat laku bermoral, beradab, dan berakhlak. Inilah maksud ayat suci, "*Innamā yakhsyā 'l-Lāh-a min 'ibād-ihi 'l-'ulamā'-u*" (Sesungguhnya yang benar-benar bertakwa kepada Allah dari kalangan para hamba-Nya ialah para '*ulamā*' [ilmunan, *scientists*].)

Konteks penegasan yang amat penting itu, untuk kita pikirkan bersama, adalah seperti dijelaskan dalam Q 35:27-28:

“Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, kemudian dengan air itu Kami (Allah) hasilkan buah-buahan dalam aneka warna.

Dan di gunung pun ada garis-garis putih dan merah dalam aneka warna, juga ada yang hitam kelam.

Demikian pula manusia, binatang melata dan ternak, semuanya juga beraneka warna.

Sesungguhnya yang benar-benar bertakwa kepada Allah dari kalangan para hamba-Nya ialah para ‘ulamā’ (para ilmuan).

Sesungguhnya Allah adalah Mahamulia dan Maha Pengampun.”

Etos keilmuan Islam itu adalah sejajar dengan etos ijtihad, suatu ungkapan yang menggambarkan usaha sungguh-sungguh dalam segala bidang—kata *ijtihād*, seperti halnya *jihād* dan *mujāhadah*, berasal dari akar kata *juhḍ* yang artinya kerja dengan bersungguh-sungguh. Dan ijtihad itu sendiri adalah sejajar dan selaras dengan ide tentang mengikuti suatu jalan pikiran yang tidak hanya pada batas *qawl-an* saja tetapi juga mencangkup *manhaj-an* sebagaimana disinggung di atas. Jadi, ijtihad adalah cara berpikir yang dinamis, kreatif, dan terbuka.

Berkenaan dengan etos ijtihad, perlu diketahui bahwa kebangkitan kembali Islam di zaman modern berhubungan erat dengan ditumbuhkan dan dikembangkannya kembali etos ijtihad itu seperti dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridla. Juga oleh Sir Sayyid Ahmad Khan, Maulana Abdul Kalam Azad, Muhammad Iqbal, dan Syah Waliyyullah. Dari perbendaharaan Islam klasik, yang *notabene* juga banyak menjadi rujukan para pemikir Muslim modern, Ibn Taimiyah adalah salah seorang yang paling gigih memperjuangkan dikembalikan dan dikembangkannya etos ijtihad itu. Secara singkat, Ibn Taimiyah menggambarkan pendapat para pemikir Islam tentang nilai ijtihad, kemudian menyimpulkan pendapatnya sendiri, seperti tertera berikut ini:

1. Karena yakin akan kemampuan akal untuk menemukan kebenaran, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa suatu ijtihad harus menghasilkan kebenaran, dan tidak boleh salah. Jika salah, maka orang bersangkutan berdosa dan akan diazab Allah.
2. Sebagian kaum *mutakallimūn* (para ahli teologi rasional Islam), di kalangan sebagian kaum Asy'ariy dan lain-lain, berpendapat hal yang sama, yaitu bahwa ijtihad harus menghasilkan pengetahuan yang benar dan tidak boleh salah, dan jika salah orang bersangkutan berdosa. Tetapi, berbeda dari pendapat kaum Mu'tazilah, terserah kepada Allah apakah orang yang salah dalam ijtihadnya itu akan disiksa atau tidak.
3. Pendapat ketiga, yang oleh Ibn Taimiyah disebut sebagai pendapat kaum Salaf yang salih, termasuk para sahabat dan *Tābi'in*, mengatakan bahwa suatu ijtihad belum tentu menghasilkan kesimpulan yang benar, karena kemampuan manusia memahami dan menemukan kebenaran terbatas saja. Jadi selalu ada kemungkinan ia membuat kesalahan. Maka, sesuai dengan sabda Nabi, orang yang berijtihad dan menghasilkan kebenaran akan mendapat pahala ganda, dan jika ternyata salah ia masih akan mendapat satu pahala.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pengembangan etos keilmuan di negeri kita dapat mengacu sepenuhnya kepada etos keilmuan yang diajarkan Islam yang telah dibuktikan dalam sejarahnya yang panjang (perlu diingat bahwa masa kejayaan Islam dahulu masih dua-tiga kali lipat lebih panjang daripada masa kejayaan Barat modern sekarang ini). Oleh karena itu, menurut dinamika etos keilmuan Islam, untuk membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan zaman dan meresponinya, kita harus mampu dengan cermat mendeteksi gejala perkembangan sosial yang terjadi, baik yang kuantitatif maupun yang lebih ditekankan yaitu dari segi kualitatif, kemudian kita pahami kecenderungan dasar yang melandasi dan melatarbelakanginya.

Analog dengan perintah Tuhan untuk memperhatikan ciptaan-Nya dan memahami hukum-hukum yang menguasai ciptaan itu (*Sunnatullāh*), kita harus memperhatikan hukum sejarah dan mempelajari temuan-temuan manusia tentang hukum sejarah itu sebagai realisasi dari semangat “Carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina”. Dengan kata lain, kita harus percaya kepada manusia dan nilai kemanusiaan yang banyak ditekankan dalam Islam. Percaya kepada manusia dan nilai kemanusiaan inilah yang dahulu melandasi para pemikir Muslim sehingga mereka tidak segan-segan belajar dari siapa saja dan ke mana saja.

Hendaknya kita ketahui bahwa dalam mengembangkan paham kemanusiaan atau humanisme, Barat pun mengambil dari ajaran Islam, atau terpengaruh oleh ajaran Islam—yang meskipun disayangkan bahwa di Barat humanisme harus melakukan “talak tiga” dengan Gereja saat itu. Ini misalnya dituturkan oleh seorang filsuf kemanusiaan, Giovanni Picodella Mirandola, salah seorang pemikir humanis terkemuka zaman Renaissance Eropa. Ia mengucapkan sebuah orasi ilmiah tentang harkat dan martabat manusia di depan para pemimpin gereja, dan ia membuka orasinya itu dengan kalimat:

I have read in the records of Arabians, reverend Fathers, that Abdala (*‘Abd-Allāh*) the Saracen, when questioned as to what on this stage of the word, as it were, could be seen most worthy of wonder, replied: “There is no thing to be seen more wonderful than man.” In agreement with this opinion is the saying of Hermes Trismegistus: “A great miracle, Asclepius, is man.”¹

Menurut Paul Oskar Kristeller dalam buku itu, kemungkinan *‘Abd-Allāh* itu adalah keluarga Nabi. Boleh jadi dia adalah seorang tokoh

¹ Ernest Cassirer, dll., penyunting, *The Renaissance Philosophy of Man*, (Chicago, 1984), hal. 223

Syi'ah seperti Abd-Allah ibn Ja'far al-Shadiq atau 'Abd-Allah al-Mahdi yang pernah menjadi Khalifah di Maghrib (909-934 M).

Jadi, sudah sangat sepatutnya kita sekarang menghidupkan kembali kepercayaan yang lebih besar kepada manusia dan kemanusiaan. Sikap ini akan mempunyai dampak keterbukaan cara berpikir yang luas dan kreatif, tanpa kehilangan sikap kritis, yang sangat diperlukan dalam usaha menumbuhkan dan mengembangkan etos keilmuan di kalangan kaum Muslim. Sebab manusia di mana pun adalah sama saja, karena adanya unsur abadi (*perennial*) yang tak akan berubah, sesuai dengan penegasan dalam al-Qur'an:

"Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama itu secara hanif, sesuai dengan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Itulah agama yang tegak-lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui," (Q 30:30).

Pada saat ini, sikap untuk menghidupkan kembali kepercayaan yang lebih besar kepada manusia harus menjadi tema pemikiran Islam kontemporer pada tingkat internasional, sebagai pengungkapan kembali hakikat manusia selaku makhluk yang terikat dengan perjanjian abadi, primordial, dan *perennial* dengan Allah. Sebagaimana firman Allah:

"Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil dari anak turun Adam, dari tulang punggung mereka, keturunan mereka, dan meminta mereka persaksian atas diri mereka sendiri, 'Bukankah Aku ini Tuhanmu sekalian?!' Mereka berkata, 'Benar, kami bersaksi!' (Ini agar janganlah kamu nanti berkata pada Hari Kiamat, 'Sesungguhnya kami lupa akan hal itu,'" (Q 7:172). [❖]

Lampiran I

(Dari Eric J. Lerner, *The Big Bang Never Happened*, New York: Vintage Books, 1992, h. 90-92):

The way for a revival of trade, and subsequently of science, was cleared by the Islamic conquest. By 613 A.D., when (Prophet) Muhammad first began to preach his new revelations, the once mighty Byzantine empire was an empty husk, holding no sway over the outlying territory of Arabia. Unlike Jesus, Muhammad stepped into a virtual political cacum in which he was able to push his ideas of social justice (probably influenced by Monophysite doctrine) into immediate practice.

Those ideas of justice, based on the grievances of the merchants and tradesmen of the empire, restricted the depredations of tax gatherers and usurers, glorified fair dealing and trade, and created a sacred social obligation to devote a part of all wealth to social welfare—to help the improverished believer. The morality of Islam seemed so obviously superior to that of the still ravenous and decayed empire that it won adherents with brushfire speed. By the time of his death in 632, Muhammad had unified the squabbling Arab tribes, and within ten years, Muslim armies fanned out to crush imperial troops, seizing Syria in 636, Iraq the following year, and then Mesopotamia and Egypt. The Muslims were greeted everywhere as liberators by the empire's alienated population, who had been rebelling, led by Monophysite and other anti-imperial groups. The new rulers slashed taxes by one-third or one-half and a slow recovery of trade and prosperity began throughout the Mediterranean.

With this came a gradual revival of support for science. By around 800, when the center of Muslim rule shifted to Iran, Muslim scholars, often working together with Monophysite and other Christian colleagues, were busy absorbing what remained of the ancient learning of the Greeks, as well as borrowing from India. But the Arabs did not merely pass on ancient knowledge. During the height of Arabic civilization around the

year 1000, while Western Europe was still crawling out of the Dark Ages, they formulated for the first time the modern scientific method.

The most important person in this breakthrough was Ibn al-Haytham, known in the West as al-Hazen. Primarily in the field of optics, he went beyond John Philoponus and all reliance on the speculative method of ancient natural philosophy. He started from systematic, repeated experiments, and from these he developed hypotheses expressed in mathematical form. There were inspired guesses as to the physical relationships underlying various sets of measurements. If a hypothesis was seen to fit the measurements, further experiments were devised to see if the proposed relationship could accurately predict new measurements.

Here are the basic ideas of the scientific method. Science begins from systematic observation and measurement, but it does not stop there, like a mere collector of information about nature. The creative act is to generalize from data, to hypothesize a possible physical process and to describe the process in mathematical terms. Mathematics describe a relationship observed in nature, rather than claiming to *be* the underlying reality (as in Platonism or in conventional cosmology today). Finally the hypothesis is judged not on its intrinsic logic or by debate, but solely by its ability to accurately predict further measurements.

Lampiran II:

1. Segala perkara tergantung maksudnya
2. Yang pasti tidak boleh dihilangkan oleh yang meragukan
3. Pada prinsipnya (manusia) bebas dari tanggungan
4. Hasil ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang sama
5. Beratnya tanggungan beban mengundang kemudahan
6. Sesuatu jika menyempit menjadi longgar dan jika melonggar menjadi sempit
7. Tidak boleh merugikan dan dirugikan
8. Bahaya harus selalu diusahakan menghilangkannya
9. Keadaan darurat membolehkan hal-hal terlarang
10. Keadaan darurat ditentukan menurut kadarnya
11. Sesuatu yang diperbolehkan karena alasan tertentu batal dengan hilangnya alasan itu
12. Jika halangan telah hilang maka hal terlarang kembali (seperti semula)
13. Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya serupa
14. Bahaya khusus harus ditanggung untuk menolak bahaya umum
15. Bahaya yang lebih keras dihilangkan (dihindari) dengan (menempuh) bahaya yang lebih ringan
16. Jika dua bahaya dihadapi maka harus dihindarkan yang lebih besar bahayanya (dengan menempuh yang lebih ringan)
17. Dipilih yang lebih ringan dari dua keburukan
18. Sesuatu yang tidak dapat diperoleh semua tidak boleh ditinggalkan semua
19. Menghindari bahaya lebih utama daripada meraih manfaat
20. Bahaya harus dihindarkan sedapat mungkin
21. Keadaan perlu sama nilainya dengan keadaan darurat
22. Adat itu dihukumkan (diakui sebagai sumber hukum)
23. Tidak dapat diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman
24. Bertahan lebih mudah daripada memulai
25. Tindakan untuk rakyat harus memperhatikan kemaslahatan

26. Jika penerimaan makna lahiriah sulit, maka dibawa ke makna kiasan (majaz)
27. Jika pelaksanaan bunyi lafal mengalami kesulitan, maka boleh diabaikan
28. Tidak boleh ada hujah berdasarkan kemungkinan
29. Tidak boleh ada pertimbangan berdasarkan dugaan
30. Pada prinsipnya segala perkara dibolehkan (kecuali jika ada petunjuk yang lain)
31. Hukum berjalan (berlaku) bersama rasionya (alasannya)
32. Sesuatu yang diperlukan untuk sempurnanya hal yang wajib adalah juga wajib